

**ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
(KAJIAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA)**

Baihaqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: boy21ismail@gmail.com

Abstract

Based on data released by BPS, the percentage of poverty in Pidie Jaya until the end of 2020 has not shown a significant decline. It is also influenced by various factors. The purpose of this study was to determine the role of government and the effectiveness of government programs and to determine the obstacles faced by the government in reducing poverty. Because this research is a qualitative research which analyzed descriptively, primary data can be obtained directly by interviewing several sources including the head of Baitul Mal, the Baitul Mal Secretariat in Pidie Jaya, Bappeda Employees and the PKH Committee in Pidie Jaya. While the secondary data is obtained by examining documentation in the form of books, journals, articles, websites and other research results as well as other relevant documents to help answer the problem formulation through the data. In addition, the authors also analyze the data that the authors get from internal data from various government agencies in Pidie Jaya. The technique that the writer uses to collect all the data is the technique of observation, interviews, and documentation. The results show that the government in reducing poverty has made various policies and roles, to optimize the performance in collaboration with several agencies such as Baitul Mal, Social Service, Bappeda and Public Works Office. It cannot be denied, that the data released by BPS shows a negative trend, however, various efforts and programs that have been carried out by the local government to reduce poverty have not been effective and in fact the program has not had optimal implications. Of course, this condition is influenced by several obstacles, including human resources, facilities and infrastructure, lack of employment opportunities, ineffective performance of state apparatus and assistance that is not well targeted.

Keywords: Role Effectiveness, Poverty Rate, Pidie Jaya Regency

Abstrak

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, persentase angka kemiskinan di Pidie Jaya hingga akhir 2020 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan efektivitas program pemerintah serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang

dianalisis secara deskriptif maka data primer dapat diperoleh secara langsung dengan wawancarai beberapa narasumber di antaranya kepala Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal Pidie jaya, Pegawai Bappeda dan Panitia PKH di Pidie Jaya. Sedangkan data sekundernya diperoleh dengan menelaah dokumentasi berupa buku, jurnal, artikel, website dan hasil penelitian lainnya serta dokumen lainnya yang relevan guna membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis data-data yang penulis dapatkan dari data internal berbagai instansi pemerintah Pidie Jaya. Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan semua data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam menurunkan kemiskinan telah membuat berbagai kebijakan dan peran, untuk mengoptimalkan kinerja tersebut bekerja sama dengan beberapa instansi seperti, Baitul Mal, Dinas Sosial, Bappeda dan Dinas Pekerjaan umum. Tidak bisa di pungkiri, bahwa secara data yang dirilis oleh BPS menunjukkan tren negatif, akan tetapi Berbagai upaya dan program yang telah di lakukan oleh pemerintah setempat untuk menurunkan kemiskinan belum efektif dan nyatanya program tersebut belum berimplikasi secara optimal. Tentu kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala di antaranya disebabkan oleh SDM, sarana dan prasarana, minimnya lapangan kerja, kurang efektifnya kinerja aparatur negara serta bantuan yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Efektivitas Peran, Angka Kemiskinan, Kabupaten Pidie Jaya

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali di jumpai dalam kehidupan bersosial. Kemiskinan sering kali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat, rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Pidie Jaya, di mana kemiskinan di setiap tahun masih berada pada persentase yang masih tinggi dan tidak stabil. Seharusnya kemiskinan itu sendiri harus mampu diminimalisirkan setiap tahunnya. Permasalahan tersebut hingga saat ini menjadi masalah utama yang dihadapi dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun penurunan tersebut belum secara signifikan seperti yang tertuang dalam tabel di atas. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan itu sendiri. Tidak hanya itu, di lansir dari Analisis provinsi Aceh tahun 2015 Pidie Jaya termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, tingkat penurunan kemiskinan di bawah rata-rata.¹ Kemudian di tinjau dari segi perkembangan indikator utama dalam pengembangan wilayah adalah salah satunya bertujuan pengurangan terhadap kemiskinan itu sendiri.

¹ Seri. Analisa pembangunan wilayah provinsi Aceh tahun 2015, h. 4

Potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang sekitar 10,83 persen perekonomian di Aceh dengan komoditas minyak dan gas. Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami peningkatan periode 2011-2012, kemudian menurun pada tahun 2012-2014. Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Aceh memiliki laju pertumbuhan rata-rata 2,90%, pertumbuhan ekonomi Aceh dari tahun 2012-2014 melambat karena pengaruh produksi aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang menurun, ditunjukkan dengan pertumbuhan kedua sektor tersebut negatif.

Selanjutnya dari sisi pertumbuhan ekonomi Aceh merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya digolongkan dalam upaya peningkatan setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dari meningkatnya setiap tahun, walaupun pada tahun 2014 terjadinya penurunan yang sangat signifikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang dikutip dari Prabowo Dwi Kristanto², pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan³.

Namun, kenyataannya, yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya berbanding terbalik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Kabupaten Pidie Jaya terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan

²Prabowo Dwi Kristanto, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012, "skripsi" yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro Semarang, 2014, h. 5

³ Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf

tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Namun bantuan yang telah di berikan pemerintah Pidie Jaya dalam memberantas kemiskinan sejauh ini belum bisa memberantas kemiskinan, akan tetapi mampu di minimalisirkan sekecil mungkin. Hal ini mengidentifikasi bahwa bantuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh kalangan masyarakat yang tergolong miskin, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan yang terkait dengan pemberantasan kemiskinan.

B. Kajian Teori

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.⁴ Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Menurut Drucker efektivitas didefinisikan sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).⁵

⁴ Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), h. 120.

⁵ Drucker, Peter F. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Pustaka, 2008), h. 5

Dari kedua definisi yang dikemukakan oleh Drucker tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi, dalam Siahaan, mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula.⁶

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia walaupun sering kali tidak disadari, kehadirannya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan.

Taqyuddinal-Nabhani⁷ dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* menyatakan bahwa kata *faqru* (kemiskinan), menurut bahasa maknanya adalah *ihtiyaj* (membutuhkan). *Iftaqarailaihi* maknanya adalah *ihtaja* (membutuhkan). Ia adalah *faqiir* (orang yang membutuhkan) yang bentuk jamaknya adalah *fuqara'*. Hal ini, karena seseorang bisa saja membutuhkan sesuatu, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan.

kemudian menurut Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti⁸ dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pembangunan Syariah* kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik di tinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶ Siahaan, *Efektivitas*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.17

⁷Taqyuddinal-Nabhani, "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*", terj. Moh. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti,1996). h. 228.

⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "*Ekonomi Pembangunan Syariah*", Cet..1, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 68

Faktor-Faktor Kemiskinan

Adapun penyebab terjadinya kemiskinan yang sering jumpai di kalangan masyarakat telah di kemukakan oleh Wildana Wargadinata⁹ bahwa sebab-sebab terjadinya kemiskinan terkait dengan model interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam dan dengan masyarakatnya. Sebab-sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam terjadi bila dilakukan pola destruktif antara manusia dengan alam seperti eksploitasi alam tanpa melakukan analisis dampak lingkungan, kecenderungan untuk menghabiskan seluruh potensi alam, keengganan mengadakan peremajaan demi kelanjutan alam, dan lain-lain. Selanjutnya akibat yang terjadi dari interaksi tersebut ialah kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moeleong, kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena yang terjadi, misalnya kebijakan, persepsi, tindakan dll.¹⁰ sedangkan penelitian deskriptif adalah membuat pemeriksaan (pengelompokan) secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.¹¹

Lokasi penelitian

Lokasi Pidie Jaya terletak pada 4,91-5,30 Lintang Utara dan 96,02-96,36 Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Di kabupaten

⁹Wildana Wargadinata, *“Islam dan Pengentasan Kemiskinan”*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h. 19-21

¹⁰Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6.

¹¹Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 4

tersebut terdapat 8 Kecamatan yang terbagi dalam 34 mukim, 222 Desa, dan 600 Dusun.

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai pihak dinas sosial, pemerintah Kabupaten setempat yang menangani kemiskinan dan pihak pendukung lainnya untuk mengetahui kebijakan terhadap penyelesaian kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang kemiskinan serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai permasalahan tersebut, dan juga data lainnya yang relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pihak instansi terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis dari pemerintah dan dinas sosial, baik dalam bentuk buku, Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Aceh, Perkembangan Pembangunan Provinsi Aceh, Aceh Dalam Angka, Profil Pembangunan Aceh, Data Bank Indonesia, Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan ini, serta Al-Qur'an Dan Hadis.

Metode Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh dari sumber referensi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian lapangan, akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

D. Pembahasan

Konsep Pengentasan Kemiskinan

Adapun konsep pengentasan kemiskinan yang sekaligus menjadi solusi bagi usaha pengentasan kemiskinan yang telah di cetus oleh Yusuf Qaradhawi yaitu ada tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara yaitu, 1) individu, 2) masyarakat, dan 3) Negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedangkan sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

- a. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
- c. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
- d. Mengeluarkan kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesusahan.
- e. Memberikan sedekah secara sukarela seperti amal jariyah, zakat dan lain-lain.

Selanjutnya Yusuf Qaradhawi menjabarkan pula dalam enam sarana pengentasan kemiskinan yang telah diteliti dari bukunya *Faqr wa Kaifa 'Aalajahaal-Islam*.¹² Ke enam sarana tersebut sebagai berikut:

1. Bekerja

Bekerja merupakan salah satu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang dan jasa. Bekerja seperti ini yang diharapkan menjadi senjata untuk memerangi kemiskinan. Bekerja adalah faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk

¹² Yusuf Qaradhawi, "*Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-islam*", (Cet.5, Kairo: Maktabah Wahbah.1986), h. 23

kemakmuran bumi, yang juga merupakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Menurut Qaradhawi¹³ ketika menciptakan bumi, Allah sekaligus memberikan berkah kepadanya. Ia menakar makanan segenap makhluk hidup yang hidup di bumi lalu meletakkan berkah sekaligus kebaikan yang melimpah di perut bumi dan di atasnya.

2. Jaminan Sanak Famili

Untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syari'at yang orisinil dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi, ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti anak-anak kecil, orang yang lemah, orang tua renta, orang sakit atau cacat atau mereka yang tertimpa bencana sehingga mereka tidak mampu untuk bekerja. Menghadapi masalah seperti ini, Islam bertekad mengangkat dan menyelamatkan mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah dari perbuatan mengemis dan meminta-minta. Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga.

3. Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, ayah yang sudah uzur, orang-orang cacat, sedang mereka tidak mempunyai sanak saudara. Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan.

4. Jaminan Baitul Mal

Khazanah Islam atau Baitul Mal adalah harta milik negara, baik yang berupa harta benda, sarana, dan prasarana yang dikendalikan dan menghasilkan jasa pelayanan, maupun perusahaan milik negara, serta sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pajak dan seperlima dari harta rampasan perang, selain zakat yang merupakan sumber utama dari Baitul Mal. Qaradhawi¹⁴ menjadikan Baitul Mal ini sebagai sarana keempat

¹³Yusuf Qaradhawi (1995), Op.Cit., h.51

¹⁴*Ibid.*, h.138

pengentasan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang membutuhkan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun dalam Baitul Mal dapat dipergunakan.

5. Kewajiban di Luar Pajak

Ada beberapa kewajiban selain zakat yang menurut Qaradhawi merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagian kaum fakir dan miskin dalam rangka memberantas kemiskinan. Beberapa diantaranya:

1. Hak tetangga. Allah SWT memerintahkan melalui kitab-Nya untuk menjaga hak ini. Rasulullah SAW pun menyuruh kita menghormatinya. Yang dimaksud dengan tetangga bukan hanya orang yang bersebelahan rumah dengan kita. Menurut ajaran lama, empat puluh rumah dari semua sisi rumah kita termasuk tetangga.
2. Berkurban ada hari raya kurban. Menurut mazhab Hanafiah, berkurban wajib hukumnya bagi mereka yang berkelapangan
3. Tebusan *Zhihar*, yaitu barang siapa yang mengatakan kepada istrinya, "Punggungmu seperti punggung ibuku atau saudaraku" atau serupa dengan itu, haramlah baginya istrinya sampai ia membayar tebusan dengan memerdekakan budak. Bila tidak ada budak, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.
4. Tebusan bersenggama dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan. Tebusan kesalahan ini sama dengan tebusan *zhihar*.
5. *Fidyah* kelompok yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, misalnya lelaki dan wanita renta serta orang sakit yang tidak dapat sembuh lagi. Mereka wajib membayar fidyah setiap hari di bulan Ramadhan seukuran makan seorang miskin.
6. Denda haji, yaitu denda yang dibayar oleh seseorang yang melanggar suatu larangan ketika ihram sewaktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dendanya adalah menyembelih unta, sapi, atau kambing.
7. Sedekah Sukarela dan Kemurahan hati Individu

Strategi –Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan (SPK) sangatlah penting bagi daerah, karena akan menjadi acuan bagi semua pelaku baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

Untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat kronis, strategi kebijakan yang di tempuh adalah:

- a. Strategi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan ketentraman dan pemantapan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan
- b. Strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan mayoritas penduduk miskin (pro-poor growth) terutama melalui kegiatan yang dapat membuka kesempatan kerja dan keselamatan usaha bagi kelompok masyarakat miskin.
- c. Strategi kebijakan keluarga berencana dan berkualitas (KB) diarahkan secara efektif kepada penduduk yang berpenghasilan rendah dan keluarga miskin
 - d. Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri melalui perbaikan akses penduduk miskin kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan dasar.

D. Hasil Pembahasan

Peran Pemerintah dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintah Pidie Jaya telah berupaya untuk fokus menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program diantaranya:

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

Adapun program yang di jalankan Baitul Mal Pidie Jaya kepada para miskin produktif adalah:

a) Modal Usaha

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya, barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja (berjuang dan sebagainya).¹⁵

b) Penyaluran ZIS

Untuk tahun 2020, pemerintah Pijay telah menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 326.000.000, dana tersebut dialokasikan untuk 10 kategori penerima, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Tgk H Marzuki M. Ali selaku kepala Baitul Mal Pidie Jaya menyebutkan bahwa sasaran utama penerima bantuan yang bersumber dari ZIS dipriorotaskan kepada para santri, kegiatan syiar agama, Muallaf, majlis taklim, bencana alam dan bantuan bersifat insendial (tak terduga). Tidak hanya itu, bantuan tersebut juga diberikan kepada para gharimin, panti asuhan serta madrasah ulumul qur'an hingga kader hafis qur'an. ¹⁶ Kemudian Tgk H Marzuki M. Ali juga menambahkan bahwa daan ZIS tersebut merupakan dana yang terkumpul dari 3.500 ASN dan para kontraktor di Pijay.

c) Pelatihan Skill

Adapun kriteria Penerima Bantuan Pelatihan Keterampilan Kerja menurut Baitul Mal Aceh adalah:

- 1) Remaja/Pemuda berusia 18-25 tahun
- 2) berdomisili di Pidie Jaya dibuktikan dengan surat kependudukan

¹⁵<http://kbbi.web.id/modal> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 14.00 wib.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Tgk H Marzuki M. Ali selaku Kepala Baitul Mal Pijai, pada tanggal 4 Januari 2021.

- 3) Berasal dari keluarga Miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Keuchik
- 4) Berstatus putus sekolah atau belum memiliki pekerjaan tetap
- 5) Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh

d) Bantuan Produktif

Selain program bantuan modal usaha yang bersifat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan konsumtif kepada Pemberian zakat konsumtif kepada senif Fakir, Fakir Uzur dan Miskin. Penyaluran zakat tersebut dapat di lihat berdasarkan Asnaf di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.¹⁷

No	Uraian	Jumlah Penerimaan	Satuan	Satuan	Total
1	Senif Fakir				
	Santunan Fakir	2.400	Org	300.000	720.000.000
	Bantuan Rehap Perumahan	7	Unit	25.000.000	175.000.000
	Santunan Fakir Uzur	396	Org	500.000	198.000.000
2	Senif Miskin				
	Santunan Miskin	1.750	Org	300.000	525.000.000
	Santunan Santri Dayah Miskin	126	Org	500.000	63.000.000
	Bantuan Rehap Perumahan	7	Unit	25.000.000	175.000.000
	Bantuan Modal Usaha	135	Org	2.000.000	270.000.000

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, 2018

Selain program yang telah penulis sebutkan diatas, Baitul Mal di Kabupaten Pidie juga melakukan program-program pemberdayaan khususnya kepada para petani di pedesaan. Pemerintah meningkatkan penyuluhan dan juga bantuan modal dari zakat produktif bagi para petani. Selain itu, pemerintah

¹⁷ Skretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, 2018

juga melakukan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan usaha seperti petani, usaha kelontong dan juga makanan-makanan khas dari Kabupaten Pidie.¹⁸

1. Dinas Sosial Pidie Jaya

Dinas sosial mempunyai rencana strategis yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menurunkan kemiskinan dengan beberapa program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan anak terlantar dan fakir miskin yang meliputi:

- 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi:
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
 - Pembinaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
 - Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS.

2) Program PKH

Pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin di Pidie Jaya yaitu salah satunya melalui program keluarga harapan (PKH) yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial dengan program keluarga harapan (PKH) ini dipandang dapat meminimalisir fakir miskin. Pada dasarnya PKH ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

2. Dinas Pekerjaan Umum

Tidak hanya bantuan PKH, dalam mengentaskan kemiskinan di Pidie Jaya, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai dari berbagai

¹⁸ Hasil wawancara dengan Jafaruddin, MM Pegawai Baitul Mal Pidie Jaya tanggal 11 Juni 2020.

sumber dana dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk mengentaskan Kemiskinan dengan jumlah 574 rumah dhuafa yang dibangun dan 157 rumah yang dilakukan rehap. Program tersebut akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mengurangi angka kemiskinan.

3. BAPPEDA

Pemerintah BAPPEDA pijay terus menerus melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu :

a. Peningkatan SDM

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Firdaus selaku Pegawai Bappeda mengatakan bahwa Pemerintah juga berupaya meningkatkan daya saing SDM yaitu dengan memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi dan pemberdayaan terhadap komunitas wirausaha kecil.¹⁹

b. Perbaikan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Perlindungan social terdiri atas bantuan social dan system jaringan social. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolute, cacat dan lanjut usia.²⁰

c. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

Meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Pegawai Bappeda Pidie Jaya tanggal 11 Juni 2020.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Pegawai Bappeda Pidie Jaya tanggal 11 Juni 2020.

peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Firdaus yang mengatakan bahwa peningkatakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lemah dilakukan melalui program-program pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi serta program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ekonomi lemah.²¹

d. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Upaya memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali kedalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing daerah. Masyarakat miskin juga mendapatkan bantuan dan kemudahan agar bisa membiayai hidup keluarganya.²²

e. Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus member manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai Negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Pegawai Bappeda Pidie Jaya tanggal 11 Juni 2020.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Hizbullah Mukhtar, Panitia PKH Pidie Jaya tanggal 13 Juni 2020.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Diperlakukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk kemudahan izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya UMKM harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah pada sektor pedesaan dan pertanian. Selain memainkan perannya dalam menurunkan kemiskinan, pemerintah Pijay juga membuat beberapa kebijakan dalam mengentas Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu :

- a. Kebijakan Umum
- b. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
- c. Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
- d. Memenuhi hak atas pelayanan pendidikan
- e. Pemenuhan Hak atas Perumahan
- f. Pembagian Beras Bersubsidi
- g. Program Kredit Usaha Mikro

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi Kemiskinan

Kebijakan maupun peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi kemiskinan belum optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari jumlah angka kemiskinan yang masih meningkat dari tahun ke tahun. Namun tidak dipungkiri bahwa peran serta kebijakan tersebut secara data menunjukkan tren positif sebagaimana data BPS menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Terbukti bahwa penurunan angka kemiskinan pada September 2018 mencapai 31.720 jiwa (20,17 persen), berkurang sebanyak 1.879 jiwa, dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 33.599 jiwa (21,82 persen). Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, karena peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin maupun keluar dari

kemiskinan tersebut. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang lebih banyak dan lebih dalam.

Hal ini menunjukkan bahwa peran maupun kebijakan di wilayah tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Peran pemerintah Pidie Jaya dalam menanggulangi angka kemiskinan melalui berbagai program merupakan sebuah apresiasi, terlihat dari angka kemiskinan yang terus menurun dari tahun ke tahun. Namun peran tersebut akan lebih efektif jika mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, di mana strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai saat ini secara faktual belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup bagi masyarakat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat hanyalah bersifat sementara dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sementara program-program secara berkesinambungan belum dapat terealisasi.

Kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menurunkan kemiskinan

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas mengenai Peran Pemerintah dalam Upaya Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya tidak terlepas dari berbagai kendala ataupun tantangan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie jaya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Pidie Jaya

Keberadaan Sumber Daya Manusia tampaknya kurang memberikan andil yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan. dari jumlah total

masyarakat di Pidie Jaya berdasarkan data yang dirilis BPS sangat sedikit jumlah masyarakat yang berstatus PNS, misalnya pada tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 160.115 jiwa, hanya 3.697 jiwa yang sudah berstatus sebagai PNS, ini menunjukkan bahwa sebesar 2,30% masyarakat yang sudah berstatus PNS. Berbeda halnya dengan tahun selanjutnya 2019, seiring bertambahnya jumlah penduduk, juga berdampak pada peningkatan dari sisi persentase jumlah PNS, persentase tersebut sebesar 2,36% atau sebesar 3.816 jiwa. Untuk memudahkan pembaca, penulis membuat skema seperti yang penulis uraikan di bawah ini:

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah PNS	Persentase
1	2018	160.115	3.697	2,30%
2	2019	161.430	3.816	2,36%

sumber : Bps, diolah

Secara teori SDM berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada pengambil kebijakan, namun nyatanya SDM yang ada di lingkungan kabupaten tersebut sejauh penelusuran penulis belum memberikan pengaruh yang signifikan.

2. Sarana dan Prasarana

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pemerintahan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih menjadi PR tersendiri bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Seperti jalanan yang rusak, susah akses menuju lokasi yang ingin dituju, dan masih ada rumah warga yang belum tersedianya WC didalam rumahnya sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang masih kurang memadai akan menghambat pemerintah dalam proses pengentasan kemiskinan itu sendiri.

3. Minimnya lapangan pekerjaan

Dalam hal ini, tentu Pemerintah Pidie Jaya juga harus bertanggung jawab mengatasi segala rintangan agar terwujud kesejahteraan hidup baik secara individual maupun untuk masyarakat. Di antara bentuk tanggung jawab itu adalah mengusahakan terbukanya lapangan kerja di semua bidang yang selalu didambakan masyarakat setiap saat, karena dengan adanya lapangan kerja justru dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri, yang sedikit besarnya dapat menanggulangi kemiskinan dan berkurangnya pengangguran.

4. Kurang Efektif Kinerja Aparatur Negara.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintah yang baik merupakan acuan bagi terselenggaranya pemerintahan yang dapat bersinergi dengan masyarakat guna mengentas kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

Tetapi tampaknya sikap aparat pemerintah sebagian besar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyimpangan dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintah banyak dijumpai. Hal ini menyebabkan hasil-hasil pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar tidak sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu memiliki kualitas Sumber Daya Manusia aparat yang kurang. Hal ini terjadi karena prinsip-prinsip yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan yang baik belum diimplementasikan. Selain itu, Menurut Firdaus salah satu kendala yang menjadi penghambat dalam upaya mengentas kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu SDM yang sangat terbatas, yang mana hendaknya mereka yang diterima disini sesuai dengan yang formasi yang dibutuhkan.²³lebih lanjut, persentase untuk kondisi umur produktif juga

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Pegawai Bappeda Pidie Jaya tanggal 11 Juni 2020.

rendah, yang mana penduduk di kabupaten di Pijay, umur penduduk dari usia 15-64 dalam klaster produktif hanya sebesar 63,92%. Data tersebut merupakan data yang penulis kutip dari statistik kesejahteraan rakyat kabupaten pijay ditahun 2020.

5. Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran

Namun demikian, hasil studi lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kekeliruan pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya kekeliruan dalam hal ketepatan sasaran, kekeliruan dalam hal program yang dijalankan lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas, kekeliruan memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek, kekeliruan Pemerintah masih bertindak sebagai penguasa daripada sebagai fasilitator, serta kekeliruan masih berorientasinya program pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa pemerintah Pidie Jaya telah berupaya untuk fokus menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program diantaranya baitul mal Kabupaten Pidie Jaya dengan membuat program yang di jalankan kepada para miskin produktif seperti, modal usaha, penyaluran ZIS, pelatihan skill, bantuan produktif. Kemudian Dinas Sosial Pidie Jaya dengan beberapa program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan program PKH, Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pembangunan dan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai dari berbagai sumber dana dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. lebih lanjut BAPPEDA juga ikut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dengan peningkatan SDM, perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin,

pembangunan yang inklusif. Kebijakan maupun peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi kemiskinan belum optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari jumlah angka kemiskinan yang masih meningkat dari tahun ke tahun, peran maupun kebijakan di wilayah tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara nyata. Upaya Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya tidak terlepas dari berbagai kendala ataupun tantangan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu : Sumber Daya Manusia Pidie Jaya, Sarana dan Prasarana, Minimnya lapangan pekerjaan, Kurang Efektif Kinerja Aparatur Negara, Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqyuddinal-Nabhani, *“Membangun Sistem Ekonomi Alternatif”*, terj. Moh. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti,1996).
- Drucker, Peter F. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Pustaka, 2008),
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001),
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”*, http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008 MAK3.pdf
<http://kbbi.web.id/modal> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 14.00 wib.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *“Ekonomi Pembangunan Syariah”*, Cet..1, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),
- Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),
- Prabowo Dwi Kristanto, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012, “skripsi” yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro Semarang,2014,*
- Seri. *Analisi pembangunan wilayah provinsi Aceh tahun 2015,*
- Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),
- Siahaan, *Efektivitas*, (Bandung : Alfabeta, 2009),
- Skretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, 2018
- Wildana Wargadinata, *“Islam dan Pengentasan Kemiskinan”*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011),
- Yusuf Qaradhawi, *“Faqr wa Kaifa ‘Aalajaha al-islam”*, (Cet.5, Kairo: Maktabah Wahbah.1986),